

BAGIAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ketentuan Umum

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas Dana
- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Pembiayaan dan
- Arus Kas

Pembuatan laporan keuangan pemda dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD-SKPD.

Laporan keuangan pemda terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:

- Semester, yang mencakup periode Januari-Juni
- Tahunan, yang mencakup periode Januari-Desember

3.2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Proses pembuatan laporan keuangan pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus *reciprocal account* (akun RK PPKD di laporan keuangan SKPD dan akun RK SKPD di laporan keuangan PPKD).

Langkah 1 (Rekapitulasi Neraca Saldo)

Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi neraca saldo setelah penyesuaian baik dari SKPD-SKPD maupun dari PPKD. Nilai tersebut diletakan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada kertas kerja. Contoh untuk proses ini hanya menggunakan satu SKPD (dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan).

ILLUSTRASI KERTAS KERJA PEMDA SETELAH NERACA

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo Dinkes setelah penyesuaian		Neraca Saldo PPKD setelah Penyesuaian		Penyesuaian (Eliminasi)		Neraca Saldo Pemda setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di kas daerah			18.657.500.000									
1.1.1.03.01	Kas di bendaharan pengeluaran	1.500.000											
1.1.3.02.01	Piutang retribusi	60.000.000											
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000									
1.1.9.01.01	RK dinas kesehatan			1.342.500.000									
1.1.5.03.05	Persediaan obat-obatan	30.000.000											
1.2.2.01.01	Penyertaan modal pemda			2.000.000.000									
1.3.1.01.01	Tanah kantor	100.000.000											
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	20.000.000											
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	7.000.000											
1.3.3.01.01	Gedung kantor	750.000.000											
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	650.000.000											
1.3.7.01.01	Akumulasi penyusutan aset tetap		75.000.000										
2.1.3.03.01	Utang pemungutan PPN		25.000.000										
1.4.1.01.01	Dana cadangan			500.000.000									
2.2.1.01.01	Utang dalam negeri-Sektor perbankan				2.000.000.000								
2.2.1.03.01	Utang kepada pemerintah pusat				3.000.000.000								
3.1.2.01.01	Cadangan piutang		60.000.000		500.000.000								
3.1.3.01.01	Cadangan persediaan		30.000.000										
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang				2.000.000.000								
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam aset tetap		1.452.000.000										
3.4.1.01.01	RK PPKD		1.342.500.000										
3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang			5.000.000.000									
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam dana cadangan				500.000.000								
3.1.1.01.01	SiLPA				10.000.000.000								
4.1.2.01.01	Pendapatan retribusi		50.000.000										
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU				5.000.000.000								
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK				3.000.000.000								
5.1.1.01.01	Belanja gaji pokok	950.000.000											
5.1.1.01.02	Belanja tunjangan keluarga	95.000.000											
5.1.1.01.04	Belanja tunjangan fungsional	30.000.000											
5.1.1.01.05	Belanja tunjangan fungsional umum	150.000.000											
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah			200.000.000									
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga			200.000.000									
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa			100.000.000									
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000											
5.2.2.01.08	Belanja BBM/gas	1.000.000											
5.2.2.02.04	Belanja obat-obatan	75.000.000											
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000											
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000											
5.2.2.03.03	Belanja listrik	35.000.000											
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah				3.000.000.000								
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank				2.000.000.000								
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan			500.000.000									
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD			2.000.000.000									
		3.034.500.000	3.034.500.000	31.000.000.000	31.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah 2 (jurnal eliminasi)

Akuntansi PPKD kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat "*reciprocals*". Akun reciprocal adalah akun-akun rekening koran (RK) yang merupakan jenis akun perantara dan bersifat sementara.

Contoh jurnal eliminasi adalah:

	RK PPKD _____	xxx
Eliminasi RK	RK Dinas _____	xxx
	RK Kantor _____	xxx
	RK Badan _____	xxx

Dalam contoh ini, jurnal eliminasi adalah sebagai berikut:

3.4.1.01.01	RK PPKD	1.342.500.000	
1.1.9.01.01	RK Dinas Kesehatan		1.342.500.000

Langkah 3 (neraca saldo setelah penyesuaian)

Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian pada neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan deletakan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja.

Langkah 4 (identifikasi akun-akun LRA)

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada kertas kerja.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi Anggaran" dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom (tidak *balance*). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai "SiLPA Tahan Berjalan". Nilai ini ditempatkan di bawah

kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Langkah 5 (identifikasi akun-akun neraca)

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada kertas kerja.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Neraca” dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom (tidak *balance*). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SiLPA Tahan Berjalan”. Nilai “SiLPA Tahan Berjalan” yang dihasilkan dalam kolom “Neraca” harus sama dengan nilai “SiLPA Tahan Berjalan” yang dihasilkan oleh kolom “Laporan Realisasi Anggaran”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Akuntansi PPKD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca Konsolidasi dan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi.

ILLUSTRASI KERTAS KERJA PEMDA SETELAH JURNAL ELIMINASI/PENYESUAIAN

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo Dinkes setelah penyesuaian		Neraca Saldo PPKD setelah Penyesuaian		Penyesuaian (Eliminasi)		Neraca Saldo Pemda setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di kas daerah			18.657.500.000									
1.1.1.03.01	Kas di bendaharan pengeluaran	1.500.000											
1.1.3.02.01	Piutang retribusi	60.000.000											
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000									
1.1.9.01.01	RK dinas kesehatan			1.342.500.000			1.342.500.000						
1.1.5.03.05	Persediaan obat-obatan	30.000.000											
1.2.2.01.01	Penyertaan modal pemda			2.000.000.000									
1.3.1.01.01	Tanah kantor	100.000.000											
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	20.000.000											
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	7.000.000											
1.3.3.01.01	Gedung kantor	750.000.000											
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	650.000.000											
1.3.7.01.01	Akumulasi penyusutan aset tetap		75.000.000										
2.1.3.03.01	Utang pemungutan PPN		25.000.000										
1.4.1.01.01	Dana cadangan			500.000.000									
2.2.1.01.01	Utang dalam negeri-Sektor perbankan				2.000.000.000								
2.2.1.03.01	Utang kepada pemerintah pusat				3.000.000.000								
3.1.2.01.01	Cadangan piutang	60.000.000			500.000.000								
3.1.3.01.01	Cadangan persediaan	30.000.000											
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang				2.000.000.000								
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam aset tetap		1.452.000.000										
3.4.1.01.01	RK PPKD		1.342.500.000			1.342.500.000							
3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang			5.000.000.000									
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam dana cadangan				500.000.000								
3.1.1.01.01	SiLPA				10.000.000.000								
4.1.2.01.01	Pendapatan retribusi		50.000.000										
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU				5.000.000.000								
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK				3.000.000.000								
5.1.1.01.01	Belanja gaji pokok	950.000.000											
5.1.1.01.02	Belanja tunjangan keluarga	95.000.000											
5.1.1.01.04	Belanja tunjangan fungsional	30.000.000											
5.1.1.01.05	Belanja tunjangan fungsional umum	150.000.000											
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah			200.000.000									
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga			200.000.000									
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa			100.000.000									
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000											
5.2.2.01.08	Belanja BBM/gas	1.000.000											
5.2.2.02.04	Belanja obat-obatan	75.000.000											
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000											
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000											
5.2.2.03.03	Belanja listrik	35.000.000											
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah				3.000.000.000								
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank				2.000.000.000								
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan			500.000.000									
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD			2.000.000.000									
		3.034.500.000	3.034.500.000	31.000.000.000	31.000.000.000	1.342.500.000	1.342.500.000	-	-	-	-		

ILLUSTRASI KERTAS KERJA PEMDA SETELAH IDENTIFIKASI LRA DAN NERACA

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo Dinkes setelah penyesuaian		Neraca Saldo PPKD setelah Penyesuaian		Penyesuaian (Eliminasi)		Neraca Saldo Pemda setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di kas daerah			18.657.500.000				18.657.500.000	-			18.657.500.000	-
1.1.1.03.01	Kas di bendaharan pengeluaran	1.500.000						1.500.000	-			1.500.000	-
1.1.3.02.01	Piutang retribusi	60.000.000						60.000.000	-			60.000.000	-
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000				500.000.000	-			500.000.000	-
1.1.9.01.01	RK dinas kesehatan			1.342.500.000			1.342.500.000		-			-	-
1.1.5.03.05	Persediaan obat-obatan	30.000.000						30.000.000	-			30.000.000	-
1.2.2.01.01	Penyertaan modal pemda			2.000.000.000				2.000.000.000	-			2.000.000.000	-
1.3.1.01.01	Tanah kantor	100.000.000						100.000.000	-			100.000.000	-
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	20.000.000						20.000.000	-			20.000.000	-
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	7.000.000						7.000.000	-			7.000.000	-
1.3.3.01.01	Gedung kantor	750.000.000						750.000.000	-			750.000.000	-
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	650.000.000						650.000.000	-			650.000.000	-
1.3.7.01.01	Akumulasi penyusutan aset tetap		75.000.000					-	75.000.000			-	75.000.000
2.1.3.03.01	Utang pemungutan PPN		25.000.000					-	25.000.000			-	25.000.000
1.4.1.01.01	Dana cadangan			500.000.000				500.000.000	-			500.000.000	-
2.2.1.01.01	Utang dalam negeri-Sektor perbankan				2.000.000.000			-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang kepada pemerintah pusat				3.000.000.000			-	3.000.000.000			-	3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan piutang		60.000.000		500.000.000			-	560.000.000			-	560.000.000
3.1.3.01.01	Cadangan persediaan		30.000.000					-	30.000.000			-	30.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang				2.000.000.000			-	2.000.000.000			-	2.000.000.000
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam aset tetap		1.452.000.000					-	1.452.000.000			-	1.452.000.000
3.4.1.01.01	RK PPKD		1.342.500.000			1.342.500.000		-				-	-
3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang			5.000.000.000				5.000.000.000	-			5.000.000.000	-
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam dana cadangan				500.000.000			-	500.000.000			-	500.000.000
3.1.1.01.01	SILPA				10.000.000.000			-	10.000.000.000			-	10.000.000.000
4.1.2.01.01	Pendapatan retribusi		50.000.000					-	50.000.000	-	50.000.000		
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU				5.000.000.000			-	5.000.000.000	-	5.000.000.000		
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK				3.000.000.000			-	3.000.000.000	-	3.000.000.000		
5.1.1.01.01	Belanja gaji pokok	950.000.000						950.000.000	-	950.000.000			
5.1.1.01.02	Belanja tunjangan keluarga	95.000.000						95.000.000	-	95.000.000			
5.1.1.01.04	Belanja tunjangan fungsional	30.000.000						30.000.000	-	30.000.000			
5.1.1.01.05	Belanja tunjangan fungsional umum	150.000.000						150.000.000	-	150.000.000			
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah			200.000.000				200.000.000	-	200.000.000			
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga			200.000.000				200.000.000	-	200.000.000			
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa			100.000.000				100.000.000	-	100.000.000			
5.2.2.01.01	Belanja ATK	10.000.000						10.000.000	-	10.000.000			
5.2.2.01.08	Belanja BBM/gas	1.000.000						1.000.000	-	1.000.000			
5.2.2.02.04	Belanja obat-obatan	75.000.000						75.000.000	-	75.000.000			
5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.000.000						50.000.000	-	50.000.000			
5.2.2.03.02	Belanja air	20.000.000						20.000.000	-	20.000.000			
5.2.2.03.03	Belanja listrik	35.000.000						35.000.000	-	35.000.000			
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah				3.000.000.000			-	3.000.000.000	-	3.000.000.000		
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank				2.000.000.000			-	2.000.000.000	-	2.000.000.000		
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan			500.000.000				500.000.000	-	500.000.000			
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD			2.000.000.000				2.000.000.000	-	2.000.000.000			
		3.034.500.000	3.034.500.000	31.000.000.000	31.000.000.000	1.342.500.000	1.342.500.000	32.692.000.000	32.692.000.000	13.050.000.000		28.276.000.000	19.642.000.000
										SILPA Tahun Berjalan	8.634.000.000		8.634.000.000
											13.050.000.000	13.050.000.000	28.276.000.000

Langkah 6 (jurnal penutup)

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pendapatan	xxx
Apropriasi Belanja	xxx
Surplus/(Defisit)	xxx
Belanja	xxx
Estimasi Pendapatan	xxx
Surplus/(Defisit)	xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SiLPA di neraca menjadi jumlah yang benar.

Contoh jurnal penutup untuk neraca saldo di atas adalah sebagai berikut:

4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	50.000.000	
4.2.2.01.01	Pendapatan-DAU	5.000.000.000	
4.2.3.01.02	Pendapatan-DAK	3.000.000.000	
	SiLPA Tahun Berjalan		8.050.000.000
	SiLPA Tahun Berjalan	1.916.000.000	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi		950.000.000
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga		95.000.000
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional		30.000.000
5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum		150.000.000
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah		200.000.000
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga		200.000.000
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa		100.000.000
5.2.2.01.01	Belanja ATK		10.000.000
5.2.2.01.08	Belanja BBM/gas		1.000.000
5.2.2.02.04	Belanja obat-obatan		75.000.000
5.2.2.03.01	Belanja telepon		50.000.000
5.2.2.03.02	Belanja air		20.000.000
5.2.2.03.03	Belanja listrik		35.000.000
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah	3.000.000.000	
6.1.4.03.01	Penerusan pinjaman dari bank	2.000.000.000	
	SiLPA Tahun Berjalan		5.000.000.000
	SiLPA Tahun Berjalan	2.500.000.000	
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan		500.000.000
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD		2.000.000.000
	SiLPA Tahun Berjalan	8.634.000.000	
3.1.1.01.01	SiLPA		8.634.000.000

Langkah 7 (LRA dan neraca)

Setelah jurnal penutup selesai dibuat, selanjutnya akuntansi PPKD menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Contoh LRA dan Neraca untuk neraca saldo setelah penutupan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

ILUSTRASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi
	PENDAPATAN		
4.1.2.01.01	Pendapatan retribusi	55.000.000	50.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan-DAU	5.250.000.000	5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan-DAK	3.100.000.000	3.000.000.000
	BELANJA		
5.1.1.01.01	Belanja gaji pokok	1.000.000.000	950.000.000
5.1.1.01.02	Belanja tunjangan keluarga	100.000.000	95.000.000
5.1.1.01.04	Belanja tunjangan fungsional	30.000.000	30.000.000
5.1.1.01.05	Belanja tunjangan fungsional umum	150.000.000	150.000.000
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kpd pemerintah	210.000.000	200.000.000
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga	210.000.000	200.000.000
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kpd pemerintah desa	110.000.000	100.000.000
5.2.2.01.01	Belanja ATK	11.000.000	10.000.000
5.2.2.01.08	Belanja BBM/gas	1.000.000	1.000.000
5.2.2.02.04	Belanja obat-obatan	80.000.000	75.000.000
5.2.2.03.01	Belanja telepon	55.000.000	50.000.000
5.2.2.03.02	Belanja air	21.000.000	20.000.000
5.2.2.03.03	Belanja listrik	35.000.000	35.000.000
	Suplus/(Defisit)	6.392.000.000	6.134.000.000
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah	3.000.000.000	3.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan	500.000.000	500.000.000
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	2.500.000.000	2.500.000.000
	SILPA	8.892.000.000	8.634.000.000

.....,20xx
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH
 (tanda tangan)
 (nama lengkap)

ILUSTRASI NERACA

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1**

Uraian	Jumlah
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di kas daerah	18.657.500.000
Kas di bendahara pengeluaran	1.500.000
Piutang retribusi	60.000.000
Piutang DAU	500.000.000
Persediaan obat-obatan	30.000.000
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi permanen	2.000.000.000
ASET TETAP	
Tanah kantor	100.000.000
Mesin fotocopy	20.000.000
Papan tulis elektronik	7.000.000
Gedung kantor	750.000.000
Gedung rumah jabatan	650.000.000
Akumulasi penyusutan aset tetap	(75.000.000)
DANA CADANGAN	
Dana cadangan	500.000.000
JUMLAH ASET	23.201.000.000
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang dalam negeri-Sektor perbankan	2.000.000.000
Utang kepada pemerintah pusat	3.000.000.000
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
SiLPA	18.659.000.000
Cadangan piutang	560.000.000
Cadangan persediaan	30.000.000
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	2.000.000.000
Diinvestasikan dalam aset tetap	1.452.000.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	(5.000.000.000)
EKUITAS DANA CADANGAN	
Diinvestasikan dalam dana cadangan	500.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.201.000.000

.....20xx
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Nilai SiLPA yang terdapat dalam ekuitas dana lancar merupakan nilai surplus/(defisit) yang dihasilkan oleh LRA ditambah dengan nilai SiLPA awa tahun. Secara teknis, nilai SiLPA dalam neraca dihasilkan oleh jurnal penutup, yaitu penutupan saldo “SiLPA Tahun Berjalan” pada saldo “SiLPA”.

Langkah 8 (konversi SAP)

LRA dan Neraca yang dibuat oleh akuntansi PPKD yang dihasilkan oleh system ini menggunakan format/klasifikasi akun pendapatan dan belanja Permendagri 13 Tahun 2006 yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud.

PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 PENDAPATAN		PP NO.24 TAHUN 2005 TTG SAP PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah		A. Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	→	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	→	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	→	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah	→	4. Lain-lain PAD yang Sah
B. Dana Perimbangan		B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil		Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	→	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Kudus	→	4. Dana Alokasi Kudus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
1. Pendapatan Hibah	→	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	→	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	→	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	→	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	→	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		C. Lain-lain Pendapatan yang Sah
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapagtan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 BELANJA		PP NO.24 TAHUN 2005 TTG SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	→	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	→	2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi	→	3. Bunga
4. Belanja Hibah	→	4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial	→	5. Hibah
6. Belanja Bagi Hasil	→	6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	→	
8. Belanja Tidak Terduga	→	B. Belanja Modal
B. Belanja Langsung		1. Belanja Tanah
1. Belanja Pegawai	→	2. Belanja Peralatan dan Mesin
2. Belanja Barang dan Jasa	→	3. Belanja Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal	→	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
	→	5. Belanja Aset Tetap Lainnya
	→	6. Belanja Aset Lainnya
	→	C. Belanja Tak Terduga
	→	1. Belanja Tak Terduga
	→	D. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
	→	1. Bagi Hasil Pajak
	→	2. Bagi Hasil Retribusi
	→	3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Langkah 9 (laporan arus kas)

Laporan keuangan berikutnya yang harus dihasilkan oleh pemda adalah Laporan Arus Kas. Contoh LRA dan Neraca dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

U R A I A N	Tahun n (Rp)	Tahun n-1 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Retribusi daerah	50.000.000,00	
Dana Alokasi Umum	5.000.000.000,00	
Dana Alokasi Khusus	3.000.000.000,00	
Jumlah	8.050.000.000,00	-
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai	1.225.000.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	191.000.000,00	
Belanja Bunga	200.000.000,00	
Belanja Subsidi	200.000.000,00	
Belanja Hibah	100.000.000,00	
Jumlah	1.916.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6.134.000.000,00	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk :		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	2.000.000.000,00	
Jumlah	5.000.000.000,00	-
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	
Jumlah	2.500.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	2.500.000.000,00	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
Jumlah	-	-
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	
Pengeluaran BG yang belum dicairkan di bank	-	
Jumlah	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	8.634.000.000,00	-
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	10.023.500.000,00	-
Saldo Akhir Kas	18.657.500.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.500.000,00	-
Saldo Akhir Kas di BUD	18.659.000.000,00	-

asumsi saldo awal kas di BUD berdasarkan neraca tahun lalu sebesar Rp.10.023.500.000,00

Berikut adalah contoh dari laporan keuangan hasil konsolidasi di tingkat pemerintah daerah. Daftar akun yang terdapat dalam contoh laporan ini hanya merupakan ilustrasi saja. Susunan daftar akun disesuaikan dengan struktur kode rekening di setiap pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah				
1. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah				
1. 1. 3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1. 2.	DANA PERIMBANGAN				
1. 2. 1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				
1. 2. 2.	Dana Alokasi Umum				
1. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus				
1. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1. 3. 1.	Pendapatan Hibah				
1. 3. 2.	Pendapatan Dana Darurat				
1. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya				
1. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1. 3. 5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
JUMLAH PENDAPATAN					

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH				
2. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2. 1. 1.	Belanja Pegawai				
2. 1. 2.	Belanja Bunga				
2. 1. 3.	Belanja Subsidi				
2. 1. 4.	Belanja Hibah				
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial				
2. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada				
2. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada				
2. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga				
2. 2.	BELANJA LANGSUNG				
2. 2. 1.	Belanja Pegawai				
2. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa				
2. 2. 3.	Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan				
3. 1. 1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan				
3. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3. 1. 4.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3. 1. 6.	Penerimaan Piutang Daerah				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang				
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN NETTO				
3. 3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan				

....., tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Neraca

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1**

U R A I A N	TAHUN N (Rp)	TAHUN N-1 (Rp)
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Piutang Lain-lain Persediaan INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Lainnya ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan DANA CADANGAN Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Lain-lain Aset		
JUMLAH ASET	-	-

U R A I A N	TAHUN N (Rp)	TAHUN N-1 (Rp)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-	-

....., tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Laporan Arus Kas

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

U R A I A N	TAHUN N (Rp)	TAHUN N-1 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Pajak Daerah		
Retribusi daerah		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah		
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
Dana Alokasi Umum		
Dana Alokasi Khusus		
Dana Otonomi Khusus		
Dana Penyesuaian		
Hibah		
Dana Darurat		
Pendapatan Lainnya		
Jumlah	-	-
Arus Kas Keluar :		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah		
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Jumlah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		

U R A I A N	TAHUN N (Rp)	TAHUN N-1 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
Arus Kas Masuk :		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah		
Arus Kas Keluar :		
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin		
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya		
Jumlah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk :		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		
Penerimaan Kembali Pinjaman		
Penerimaan Piutang		
Jumlah		
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		
Pemberian Pinjaman		
Jumlah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
Pendapatan yang belum masuk bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Jumlah		

U R A I A N	TAHUN N (Rp)	TAHUN N-1 (Rp)
Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman		
Jumlah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pendapatan yang belum masuk bank Kas di Bendahara Pengeluaran		
Jumlah		
Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran BG yang belum dicairkan di bank Pengeluaran kekurangan bayar SP2D pada pihak ketiga		
Jumlah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo Akhir Kas di BUD		

....., tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Catatan Atas Laporan Keuangan

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMDA	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemda
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Pemda
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemda

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMDA	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
		5.1.1 Pendapatan
		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Aset
		5.1.4 Kewajiban
		5.1.5 Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMDA	
BAB VII	PENUTUP	

....., tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari regulasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus sebagai pedoman bagi para pengelola baik SKPD sebagai akuntansi maupun PPKD sebagai entitas pelaporan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal-hal terkait dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Palangka Raya, November 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG